

# EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA PROSES PEMBERIAN PEMBIAYAAN (Studi Kasus Pada KSU Al-Ikhlas Malang)

Nurmalika Ratna Sari

## Abstrak

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengevaluasi sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya pada prosedur pemberian pembiayaan KSU Al-Ikhlas Malang. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya kecenderungan pengembalian pembiayaan yang bermasalah sehingga terjadi pembiayaan macet pada KSU Al-Ikhlas Malang.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, dengan proses pengumpulan data berupa wawancara dan obeservasi yang meliputi Struktur organisasi, *job description*, proses dan prosedur pemberian pembiayaan mulai dari prosedur permohonan pembiayaan, prosedur pembayaran angsuran pembiayaan, prosedur pelunasan pembiayaan dan dokumen yang terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada KSU Al- Ikhlas, Sistem Penedgalian Internal proses pemberian pembiayaan mulai dari prosedur permohonan pembiayaan, pembayaran angsuran dan pelunasan pembiayaan sudah berjalan dengan baik. Akan tetapiterdapat beberapa bagian yang masih memerlukan perhatian, diantaranya masih ada perangkapan tugas, tidak ada pemisahan *job description* antara bagian keuangan dan bagian akuntansi, penggunaan SAK yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, perbaikan dokumen, serta pembuatan *flowchart*.

Kata Kunci : Evaluasi, Sistem Pengendalian Intern, Proses Pemberian Pembiayaan

## Pendahuluan

Perkembangan perekonomian nasional dan perubahan lingkungan strategis yang dihadapi dunia usaha termasuk koperasi dan usaha kecil menengah saat ini berkembang sangat cepat. Sesuai Pasal 33 ayat 1 UUD 1945, menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, maka tidak heran muncul lembaga-lembaga yang turut membantu pemerintah dalam hal pengembangan perekonomian Indonesia. Dalam penjelasan pasal ini menyatakan bahwa kemakmuran

masyarakat sangat diutamakan bukan kemakmuran orang perseorangan dan bentuk usaha seperti itu yang tepat adalah Koperasi yang didasarkan atas asas gotong royong, yang artinya bahwa peranan masyarakat maupun lembaga masyarakat harus dilibatkan. Atas dasar pertimbangan itu maka disahkan UUD RI Nomor 25 tahun 1992 pada tanggal 12 oktober 1992 "*Tentang Perkoperasian*" oleh Presiden Soeharto (Buchori: 2012).

Koperasi Simpan Pinjam Syariah kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan berjangka, serta penyaluran dana dilakukan melalui pemberian kredit atau pembiayaan kepada nasabah yang memiliki usaha mikro. Sebagai penyaluran pembiayaan yang dilakukan Koperasi Syariah tidak selamanya tidak ada hambatan, terkadang pembiayaan yang disalurkan mengalami masalah dan kegagalan pembiayaan macet atau tidak terbayarkan. Masalah dan kegagalan pembiayaan tersebut bisa disebabkan oleh faktor eksternal (pihak nasabah) dan faktor internal (pihak koperasi). Untuk itu dalam usaha pencegahan pembiayaan bermasalah, salah satu cara yang dapat diterapkan manajemen koperasi syariah yaitu dengan menerapkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang efektif dalam kegiatan operasionalnya, khususnya pada proses persetujuan pembiayaan. Hal ini dilakukan guna meningkatkan prinsip kehati-hatian sebagai upaya pencegahan terjadinya kegagalan pembiayaan atau pembiayaan bermasalah.

KSU (Koperasi Serba Usaha) Al-Ikhlas adalah koperasi serba usaha yang salah satu kegiatan usahanya sebagai unit simpan pinjam syariah. Koperasi ini tidak hanya memberikan pembiayaan kepada anggota koperasi saja tetapi juga pada nasabah lain yang bukan anggota. Dalam pemberian pembiayaan pada nasabah KSU telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menilai dan mengevaluasi nasabah yang mengajukan pembiayaan. Sistem pengendalian internal yang diterapkan KSU Al-Ikhlas memiliki struktur organisasi yang memisahkan tugas, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab di setiap bagian. Tetapi dalam aplikasinya masih ada perangkapan tugas. Dalam pembiayaan yang disalurkan pada KSU memiliki kendala dalam penyaluran pembiayaan dimana nasabah dinilai mampu membayar tetapi pada saat pembayaran angsuran mereka telat membayar bahkan ada yang tidak membayar, ini menunjukkan bahwa struktur organisasi serta otorisasi belum berjalan dengan baik. Hal ini yang akan mengakibatkan pembiayaan bermasalah (pembiayaan macet), jika tidak ditangani dengan baik akan terjadi kerugian materi pada koperasi. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka judul

yang diangkat untuk skripsi ini adalah “ *EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA PROSES PEMBERIAN PEMBIAYAAN (Studi Kasus Pada KSU Al-Ikhlas Malang)*”

Adapun tujuan penelitian ini yaitu: 1) menganalisis sistem pengendalian intern pada proses pemberian pembiayaan pada KSU Al-Ikhlas. 2) menganalisis kendala apa saja yang terjadi pada implementasi sistem pengendalian intern pada proses pemberian pembiayaan.

## **Kajian Pustaka**

### **Sistem pengendalian intern**

Pengendalian intern ialah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang, dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi.

Menurut Mulyadi (2010: 163) menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen.

Pengendalian internal sebagai satu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang rasional atas tercapainya tujuan (1) reabilitas pelaporan keuangan, (2) efektifitas dan efisiensi operasi perusahaan, dan (3) kesesuaian organisasi dengan aturan serta regulasi yang ada (Bodnar dan Hopwood, 2006: 11).

### **Koperasi**

Menurut UU No. 25 / 1992 dalam Rudianto (2010: 3) Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Koperasi Simpan Pinjam merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat, berupa pinjaman dan tempat menyimpan uang bagi masyarakat (KSPLESTARI, 2014).

Koperasi syariah tidak menetapkan bunga dalam kegiatan simpan pinjamnya karena riba bertentangan dengan spirit kemitraan, keadilan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

Sistem bunga tidak peduli dengan nasib debiturnya dan tidak adil dalam penetapan bunga atas pokok modal (Hendar,2010: 16).

## **Pembiayaan**

Menurut Rivai dan Veithzal (2008: 3) Istilah pembiayaan pada intinya berarti kepercayaan (trust), yang berarti lembaga pembiayaan memberikan kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan baik dan adil, harus disertai dengan ikatan atau akad yang jelas, serta harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang mengadakan akad.

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2005: 17).

## **Metode Penelitian**

### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan yang sebenarnya dari KSU Al-Ikhlas. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya pada proses pemberian pembiayaan.

### **Subjek penelitian**

Subjek penelitian ini adalah wawancara langsung dengan pihak KSU Al-Ikhlas yang memiliki kewenangan dan mengetahui penuh tentang sistem pengendalian proses pemberian pembiayaan pada KSU Al-Ikhlas yaitu : Manajer, Administrasi keuangan/ kasir, Bagian pembiayaan.

### **Data dan Jenis Data**

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dan observasi. Data sekunder merupakan sumber data peneliti yang diperoleh dari data-data yang tersedia, yaitu: Sejarah singkat instansi, visi dan misi, Struktur organisasi, kebijakan internal proses pembiayaan, kode rekening yang digunakan, formulir-formulir, serta berkas-berkas lain yang dibutuhkan berhubungan dengan pemberian pembiayaan.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Jogiyanto (2007) dalam penelitian salah satu hal penting adalah teknik pengumpulan data karena pemilihan teknik pengumpulan data yang relevan dengan situasi dan kondisi objek penelitian diharapkan data-data yang diperoleh mampu menggambarkan secara objektif. Pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut : 1) observasi, 2) wawancara, 3) dokumentasi.

## **Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan berdasarkan data-data yang diperoleh meliputi sistem pemberian pembiayaan kemudian dibandingkan dengan teori dan ditarik kesimpulan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan Komponen-komponen pengendalian internal yaitu dengan menggunakan COSO Framework (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treatyway Commission*) yang meliputi : Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pengawasan (Monitoring).

## **Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian serta evaluasi yang dilakukan dengan teori dari COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of Tradewey Commision*) dalam Bodnar dan Hopwood (2006: 133) yang digunakan dalam penelitian ini maka pada prakteknya dilapangan yang dilakukan oleh KSU Al-Ikhlas masih banyak kekurangan yang perlu untuk dilakukan, hal ini dapat dilihat dari beberapa bagian sebagai berikut :

### **1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)**

Lingkungan pengendalian internal terdiri dari integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, filosofi manajemen dan gaya beroperasi, struktur organisasi, serta kebijakan dan praktik sumber daya manusia.

Lingkungan pengendalian pada KSU sebetulnya sudah ada dan berlaku sesuai dengan aturan yang ada, namun masih banyak kekurangan diantaranya pada bagian pemisahan tugas serta tanggung jawab dari karyawan sehingga perlu adanya perbaikan dengan memperjelas tanggung jawab dari masing-masing karyawan agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan dapat dikontrol. Struktur organisasi pada KSU Al-Ikhlas kenyataannya masih belum berjalan dengan baik hal ini, hal ini masih terdapat perangkapan kerja beberapa bagian yang dilimpahkan hanya pada satu bagian yang sama. Perangkapan ini

tidak terlalu fatal karena perangkapan kerja ini memiliki job description yang berbeda, tapi tetap kurang efektif jika hanya dilakukan oleh satu bagian. Selain itu untuk kebijakan pengeluaran kas perlu diperbaiki dan diperjelas agar pemimpin dapat melakukan kontrol keuangan.

Hal ini diperlukan karena pada bagian keuangan dan akuntansi dipegang oleh jabatan yang sama, padahal dalam struktur organisasi yang baik bagian akuntansi haruslah terpisah. Manager memberikan kepercayaan penuh pada karyawan agar bekerja dengan jujur, namun untuk pengendalian yang baik perlu adanya pengawasan terlebih tidak ada pengawasan secara tegas terhadap pengambilan uang di bank.

Pengendalian internal dapat dilaksanakan dengan baik jika didukung oleh karyawan yang berkualitas dan kompeten. KSU Al-Ikhlas memiliki karyawan yang kompeten pada bidangnya masing-masing, karena karyawan KSU riwayat pendidikan terakhirnya semua sarjana. Karyawan yang kompeten mempunyai komitmen untuk mengikuti kebijakan, prosedur, dan standar etika organisasi.

## 2. Penilaian Resiko (*Risk Assesment*)

Penilaian resiko pada KSU Al-Ikhlas yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan adalah dengan mengidentifikasi pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet yang mana kemungkinan nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan dikarenakan masalah tertentu.

KSU Al-Ikhlas telah melakukan antisipasi dini akan adanya pembiayaan bermasalah yang dihadapi dimasa mendatang dengan melakukan beberapa prosedur yang telah ditetapkan. Langkah-langkah tersebut antara lain : penilaian terhadap calon nasabah dengan menggunakan analisa 5 C, memberikan penagihan secara intensif jika terjadi pembiayaan bermasalah, mengambil jaminan dengan musyawarah dengan nasabah, langkah terakhir adalah penghapusan pembiayaan yang sudah benar-benar tidak bisa diselamatkan. Dari langkah-langkah yang telah diterapkan oleh KSU Al-Ikhlas dirasa sudah menerapkan tahap-tahap yang cukup baik.

Hanya saja, disamping prosedur-prosedur yang diterapkan oleh KSU Al-Ikhlas terdapat suatu kegiatan yang mungkin dapat menjadi resiko yang akan ditanggung. Terkadang tidak melakukan prosedur analisa terlebih dahulu, karena nasabah adalah

kerabat atau teman dari manajer ataupun karyawan disana. Hal ini akan menjadi resiko yang kurang diperhatikan oleh KSU Al-Ikhlas.

Selain itu juga resiko kecurangan, dikarenakan tidak ada otorisasi yang jelas dari manajer jika administrasi mengambil uang di bank untuk pembiayaan. Selain itu bagian administrasi selain menyimpan uang juga sebagai yang mencatat/sebagai akuntansi, hal ini yang akan menimbulkan celah adanya kecurangan.

### 3. Aktivitas pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian sendiri dalam KSU sudah berjalan namun masih tetap membutuhkan sedikit perbaikan untuk memperketat pengendalian. Dalam menjalankan kegiatannya KSU telah memiliki beberapa dokumen tersendiri untuk beberapa aktivitasnya, sehingga dapat digunakan untuk pengecekan transaksi. Dokumen yang terkait dalam pembiayaan mulai dari berkas permohonan sampai dengan berkas penutupan pembiayaan diarsip secara sistematis dan terkomputerisasi dengan baik dan disimpan dalam almari khusus.

Untuk pemisahan tugas dari masing-masing bagian inilah yang masih adanya perangkapan kerja dan adanya perangkapan *job description* yang seharusnya dipisah. KSU perlu melakukan pemisahan tugas untuk kasir dengan akuntansi yang dipegang oleh bagian administrasi karena ini dapat menjadi celah untuk melakukan kecurangan.

### 4. Informasi dan Komunikasi

Untuk semua transaksi yang terjadi di KSU sudah dilakukan pencatatan dan digolongkan pada masing-masing akun. Sistem penyusunan laporan keuangan yang digunakan di KSU dilakukan secara komputerisasi yakni menggunakan *Microsoft Excel*. Untuk keuangan disusun setiap minggu, sehingga pihak manajer dapat melakukan kontrol dan pengendalian yang mudah dan detail dalam setiap transaksi.

Komunikasi terkait dengan memberikan pemahaman yang jelas mengenai semua kebijakan dan prosedur terkait pengendalian. Komunikasi di KSU sering tidak sinkron antara karyawan satu dengan yang lainnya atau antara karyawan dengan atasan atau manajer. Hal ini terlihat pada pemberian pembiayaan, kebijakan dan prosedur yang diinformasikan kepada nasabah sering berbeda antar karyawan. Hal ini memberikan dampak yang kurang baik, apalagi bagi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan.

## 5. Pemantauan

Untuk pengendalian internal pengawas akan Berkoordinasi dengan manajer jika menemukan bukti atau data yang menyimpang dari kebijakan yang ada. Untuk pengawasan terhadap kinerja karyawan dilakukan oleh Manager.

## Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sistem pengendalian internal dan sistem proses pemberian pembiayaan di KSU Al-Ikhlas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

### 1. Prosedur proses pemberian pembiayaan pada KSU Al-Ikhlas

Prosedur dalam proses pemberian pembiayaan sudah cukup baik untuk diaplikasikan pada KSU Al-Ikhlas karena sudah memiliki sistem yang mudah dijalankan dan di mengerti mulai dari prosedur permohonan pembiayaan, prosedur pembayaran angsuran dan prosedur pelunasan. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu disesuaikan untuk mendukung kegiatan operasional berjalan dengan lebih efisien dan dapat dikontrol yaitu dengan adanya penambahan dokumen yaitu memo yang menunjukkan adanya persetujuan manajemen dalam pencairan dana dari bank, adanya penambahan bagian akuntansi, serta flowchart.

### 2. Pengendalian internal dalam proses pemberian pembiayaan dapat dilihat dari 5 komponen yang ada yaitu :

#### a. Lingkungan pengendalian

Untuk lingkungan pengendali bisa dilihat dari struktur organisasi yang masih adanya perangkapan kerja yaitu bagian simpanan/tabungan dan petugas lapangan dikerjakan oleh bagian pembiayaan/pinjaman yang disebabkan kurangnya SDM. Serta bagian keuangan yang merangkap dengan akuntansi dalam satu bagian yaitu bagian administrasi keuangan/ kasir. Pengendalian internal dapat dilaksanakan dengan baik jika didukung karyawan yang memiliki komitmen terhadap kompetensi. KSU Al-Ikhlas memiliki karyawan yang kompetensi sesuai dengan bagiannya masing-masing. Karyawan yang memiliki komitmen terhadap kompetensi akan bekerja sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ada, serta jujur dalam setiap pekerjaannya.

#### b. Penilaian resiko



Penilaian resiko akan terjadinya pembiayaan yang macet telah diantisipasi oleh KSU, dengan melakukan prinsip kehati-hatian dalam memberi pembiayaan, yaitu dengan menggunakan analisa 5 C dalam menilai nasabah. Resiko yang ditimbulkan oleh pembiayaan macet dilihat dari kebijakan akuntansinya, bahwa KSU telah menerapkan cadangan kerugian piutang yang digunakan untuk piutang yang benar-benar tak tertagih.

c. Aktivitas pengendalian

Aktivitas pengendalian di KSU sudah berjalan namun masih tetap membutuhkan sedikit perbaikan untuk memperketat pengendalian. Dalam menjalankan kegiatannya KSU telah memiliki beberapa dokumen tersendiri untuk beberapa aktivitasnya, sehingga dapat digunakan untuk pengecekan transaksi. Namun masih ada dokumen yang tidak bernomor urut, hal ini akan sulitnya pengendalian dan pengawasan terhadap dokumen.

d. Informasi dan komunikasi

Untuk semua transaksi yang terjadi di KSU sudah digolongkan pada masing-masing akun. Sistem penyusunan laporan keuangan yang digunakan di KSU dilakukan secara komputerisasi yakni menggunakan *Microsoft Excel*. Standar pelaporan keuangan yang digunakan KSU masih aturan lama yaitu PSAK 27 dan PSAK 59 dimana sudah mengalami perubahan menjadi SAK ETAP dan PSAK Syariah. Sehingga untuk menyajikan laporan keuangan yang baik, sebaiknya mengikuti aturan yang terbaru yaitu SAK ETAP dan PSAK Syariah.

e. Pengawasan

Untuk pengendalian internal pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dalam pengelolaan koperasi dan mempunyai wewenang meneliti catatan yang ada pada koperasi. Untuk pengawasan terhadap kinerja karyawan dilakukan oleh manajer KSU.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat disimpulkan terkait proses pemberian pembiayaan dan sistem pengendalian internal proses pembiayaan sebagai berikut :

1. Terkait prosedur proses pemberian pembiayaan

Adanya struktur organisasi yang memisahkan tugas dan wewenang terkait prosedur pembiayaan. Dokumen yang digunakan harus bernomor urut untuk memudahkan dalam pengendalian dan pengawasan.

2. Terkait pengendalian internal proses pemberian pembiayaan

a. Lingkungan pengendalian

Dibentuknya bagian akuntansi tersendiri dalam struktur organisasi dan *job description*.

Penambahan karyawan yang memiliki komitmen terhadap kompetensi, dengan merekrut karyawan sesuai dengan bidang yang dibutuhkan.

b. Penilaian resiko

Perlunya ada pengawasan terhadap pembiayaan bermasalah untuk meminimalisir kerugian yang akan dialami.

c. Aktivitas pengendalian

Adanya dokumen yang bernomor urut untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian untuk meminimalisir kecurangan yang ada.

d. Informasi dan Komunikasi

Diharapkan KSU menggunakan standar pelaporan yang baru supaya selalu menyajikan laporan keuangan yang baik sesuai dengan standar yang berlaku.

e. Pemantauan

Untuk pemantauan sudah dilakukan sesuai aturan yang ada di KSU, dimana pengawas sebagai pengendali atas semua, dan untuk pengendali karyawan dilakukan oleh manajer.